

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Pemilihan umum (pemilu) adalah sebuah sarana untuk mewujudkan kedaulatan bersama dengan prinsip dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat dalam konteks negara hukum yang bersifat demokratis (Subhi, 2016: 340). Pemilihan umum di Indonesia sudah digelar sebanyak dua belas kali yaitu pada tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014, dan 2019 dengan berbagai model pemilihan umum. Pemilihan umum diikuti oleh berbagai partai. Jumlah partai politik dalam pemilihan umum disetiap tahunnya tidak selalu sama. Pemilu awalnya ditujukan untuk pemilihan anggota lembaga perwakilan seperti DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Kemudian pada tahun 2004 pemilihan presiden masuk sebagai bagian dari pemilihan umum sehingga masyarakat dapat melakukan pemilihan langsung. Pada tahun 2019 pemilihan umum dilakukan untuk memilih anggota legislatif dan juga presiden sehingga disebut pemilu serentak. Pemilihan umum serentak di Indonesia telah digelar pada 17 April 2019 lalu.

Pemilihan umum presiden 2019 telah membentuk fenomena kontestasi politik. Fenomena ini melahirkan rivalitas karena hanya terdapat dua calon pasangan yang akan dipilih pada pemilihan ini yaitu Jokowi-Ma'ruf Amin dan Prabowo-Sandi. Kemudian, dinamika politik pada pemilihan presiden ini menunjukkan adanya polarisasi dimasyarakat. Polarisasi juga disebabkan karena

menguatnya penggunaan media sosial sebagai sarana berpolitik. Terbukti aktivitas politik ini tidak hanya terjadi di dunia nyata tetapi juga di dunia maya atau media sosial. Menjelang pemilihan umum presiden 2019 beragam *hashtag* atau tanda pagar banyak hadir dalam *cyberspace*. Permatasari dkk (2017) menyatakan bahwa fenomena penggunaan tanda pagar digunakan untuk menyoroti arti khusus yang dalam perkembangannya digunakan dalam jaringan *IRC* untuk mengelompokkan label atau topik tertentu. Lebih lanjut, tanda pagar juga digunakan untuk menandai pesan individu yang terkait dengan kelompok tertentu.

Fenomena penggunaan tanda pagar ini juga marak terjadi dalam dunia maya atau *cyberspace* di Indonesia. Salah satunya terjadi jelang pemilihan umum presiden 2019 yaitu munculnya #2019GantiPresiden dan #Jokowi2Periode. Seperti yang dihimpun dari VIVA pada tanggal 11 April 2018 yang merilis berita tentang peta tren hastag kedua tagar ini menggunakan fakta analisis dari drone empirit. Data diambil per tanggal 1 April hingga 10 April 2018 menggambarkan ada 110 ribu *mention* menggunakan #2019GantiPresiden sedangkan 18 ribu untuk #Jokowi2Periode (Viva, 2018).

Dalam perkembangannya, #2019GantiPresiden berkembang menjadi deklarasi-deklarasi politik di berbagai kota di Indonesia. Adanya peran media massa membuat pemberitaan tentang #2019GantiPresiden semakin masif. Kemunculan media massa turut berperan sebagai alat komunikasi atau perantara dalam menyalurkan informasi terkait sebuah peristiwa yang terjadi. Seperti yang dihimpun dari CNN Indonesia pada tanggal 27 Agustus 2018 yang merilis berita dengan judul #2019GantiPresiden dan #Jokowi2Periode *Kebebasan Ekspresi*,

menyatakan bahwa menurut Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menyatakan bahwa fenomena deklarasi tagar yang berkembang ini adalah sebuah bentuk kebebasan dalam berpendapat sehingga masyarakat berhak melakukannya. (CNN Indonesia, 2018).

Adapun beberapa kota yang menggelar deklarasi gerakan #2019GantiPresiden yaitu; *Pertama*, pada tanggal 6 Mei 2018, ratusan relawan pendukung gerakan ini berkumpul di pintu masuk Monas, Jakarta Pusat. Kemudian melakukan deklarasi yang langsung dipimpin oleh Mardani Ali Sera (Liputan6.com, 2018). *Kedua*, Minggu 1 Juli 2018, deklarasi juga digelar depan Markobar Solo, Jawa Tengah. *Ketiga*, deklarasi di Batam pada Minggu 29 Juli 2018 yang dihadiri oleh Neno Warisman dan puluhan ribu relawan. Acara dimulai pada pukul 09.00 dan berakhir sekitar satu jam kemudian karena dibubarkan oleh pihak kepolisian (CNN Indonesia). *Keempat*, pada Minggu tanggal 16 September 2019 deklarasi dilakukan di Kabupaten Bekasi yang berlangsung di halaman kediaman Bapak Damin Sada, di desa Srijaya, Tambun Utara dihadiri oleh Mardani Ali Sera. Seharusnya rencana deklarasi akan digelar oleh relawan GAGAK di Stadium Mini, Tambun Utara, Bekasi, padahal ratusan massa telah hadir memenuhi stadium, namun gagal karena lokasi dijaga ketat ratusan personel kepolisian setempat (Tribun Jakarta, 2018). *Kelima*, pada 29 September 2018 deklarasi gerakan #2019GantiPresiden juga di adakan di Sumatra Barat dihadiri oleh Fadli Zon dan Neno Warisman (Tribbun News, 2018). *Keenam*, pada awal tahun 2019, deklarasi dilakukan kembali di Jabal Rahma Mekkah di pimpin oleh

Habib Rizieq, di mana puluhan orang berkumpul untuk menggelar deklarasi bersama berdasarkan berita pertanggal 2 Januari 2019 (Tempo.co, 2019).

Di sisi lain, deklarasi juga dibatalkan di beberapa kota lainnya di Indonesia. *Pertama*, deklarasi di Surabaya, rencana di adakan pada Minggu 26 Agustus 2018. Namun, gagal diadakan karena mengalami penolakan dari beberapa elemen masyarakat (VoaIndonesia, 2018). *Kedua*, rencana deklarasi juga batal dilaksanakan di Kota Aceh. Seharusnya mereka menggelar deklarasi pada 1 September 2018. *Ketiga*, dihari selanjutnya, Minggu 2 September 2018 deklarasi juga dibatalkan di Kabupaten Karawang (CNN Indonesia, 2018). *Keempat*, ditanggal yang sama pada 2 September rencana diadakan deklarasi di Pekanbaru Riau, namun dinyatakan batal digelar 2 hari sebelum acara deklarasi (Detik News, 2018). Batalnya deklarasi-deklarasi di beberapa kota di Indonesia dipicu oleh beberapa faktor utamanya terkait keamanan kota tempat deklarasi akan berlangsung.

Tidak hanya pendukung aksi #2019GantiPresiden yang melakukan deklarasi. Namun, relawan dari pendukung #Jokowi2Periode sebagai petahana juga berniat menggelar deklarasi di Karawang pada Minggu 2 September 2018 bersamaan deklarasi massa #2019GantiPresiden. Namun, akhirnya kedua kelompok sepakat tidak melaksanakan deklarasi demi menjaga stabilitas dan kondusifitas Karawang (CNN Indonesia, 2018).

Terlepas dari wacana 2019 Ganti Presiden atau Jokowi 2 Periode, Komisi Pemilihan Umum telah mengumumkan hasil pemilu langsung 2019. Berdasarkan

hasil penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) per tanggal 18 Juni 2019 menyatakan bahwa pemenang pemilihan umum presiden 2019 adalah Joko Widodo dengan perolehan suara sebesar 83.428.524 (55.33 %) sedangkan Prabowo dengan perolehan suara sebesar 67.351.062 (44.67%). Perolehan total suara nasional ini adalah 797.580 dari 813. 336 TPS (98.06599 %) (kpu.go.id, 2019).

Beberapa penelitian terdahulu telah mengangkat tema tentang analisis wacana pada pemilihan umum. Penelitian tentang analisis wacana Van Dijk pada Meme di media sosial saat kampanye pemilihan gubernur DKI (Saleh, 2018). Selain itu, sebagian besar studi yang telah dilakukan masih berkisar wacana kampanye politik pemilihan gubernur dan wakil gubernur (Apriad, 2013; Hardini, 2015; Zakiyah, 2015). Ada beberapa penelitian yang sebenarnya telah membahas analisis tentang pemberitaan #2019GantiPresiden menggunakan media (Putra,2018; Pratama,2018; Primasari, 2019; Syahragga, 2019) seperti Kompas.com, okezone.com dan tirto id. Hanya saja keempat penelitian tersebut berfokus pada pemberitaan berbasis media online.

Berangkat dari fakta penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang pemberitaan gerakan #2019GantiPresiden menjelang pemilihan umum presiden 2019. Objek material pada penelitian ini adalah opini dan berita pada harian Kompas sebanyak delapan artikel pada periode Mei hingga Oktober 2018. Periode ini dipilih karena Kompas banyak membahas tentang gerakan #2019GantiPresiden pada waktu tersebut. Kompas dipilih karena harian ini adalah salah satu grup media pemberitaan besar

di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dengan perkembangan Kompas yang memiliki tiga media lain seperti *Kompas.com*, *Kompasiana.com*, dan *Kompas TV*. Selain itu, *Harian Kompas* dan *Kompas.com* merupakan media yang menerima beberapa kategori penghargaan dalam ajang “Anugerah Jurnalis dan Media 2018” yang diadakan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi di Indonesia. Grup Kompas Media mendapatkan Juara 1 untuk tiga kategori dalam ajang tersebut (Kompas.com,2019). Lebih lanjut, peneliti menemukan terdapat 120 data pemberitaan dengan kata kunci 2019 Ganti Presiden, lebih spesifik 27 data dengan kata kunci #2019GantiPresiden pada website Pusat Informasi Kompas (PIK). Kompas dikenal sebagai media yang memihak pada isu-isu politik (Triana, 2019). Ditambahkannya juga bahwa Kompas adalah harian yang memiliki struktur kalimat EYD (Ejaan Yang Disempurnakan) paling baik dibandingkan dengan harian lain.

Adapun teori yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis wacana kritis Norman Fairclough. Analisis Wacana ini meliputi teks, praktik diskursif dan praksis sosial. Wacana-wacana yang muncul dalam kehidupan bermasyarakat tentu memiliki kepentingan- kepentingan tersendiri baik itu di bidang politik, sosial, ekonomi dan lain- lain. Oleh karena itu, analisis wacana Fairclough digunakan untuk membongkar makna tersembunyi di balik ideologi yang ingin disampaikan oleh produsen teks.

Peneliti memilih analisis kritis Fairclough karena dianggap tepat untuk membongkar makna atau pesan tersembunyi dibalik wacana 2019 Ganti Presiden yang diberitakan jelang pemilihan umum presiden 2019, terkait ideologi dan

dinamika politik di Indonesia. Dalam hierarki tata bahasa, wacana adalah unit tertinggi atau terbesar yang dapat digambarkan dalam bentuk esai, paragraf, kalimat, atau kata-kata yang memiliki tujuan tertentu (Kridalaksana, 2001:231). Selanjutnya, Fairclough (1995, 28-32) dan Wodak (2001, 5) menyatakan bahwa analisis wacana adalah tentang bagaimana teks bekerja dalam praktik sosiokultural. Jadi, analisis wacana itu sendiri tidak hanya dilihat sebagai penggunaan bahasa dalam pidato dan tulisan tetapi juga sebagai bentuk praktik sosial. Dalam hal ini, analisis wacana menjadi alat yang mampu berinteraksi secara eksplisit dan implisit dengan kehidupan masyarakat sehingga komunikasi dapat dibangun di tengah-tengah masyarakat dan juga digunakan sebagai gerakan untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan kata lain, analisis wacana kritis juga dapat digunakan untuk menggambarkan sesuatu, menerjemahkan, dan menganalisis berita sosial dan politik yang disajikan melalui teks. Selain itu, analisis wacana kritis tidak hanya dilihat dari aspek linguistik, tetapi juga dari hubungan antara bahasa dan konteks tertentu, termasuk tujuan spesifik dari berita sosial dan politik.

Penelitian ini penting dilakukan karena adanya wacana 2019 ganti presiden berawal dari penggunaan media sosial yang kian menyemarakkan aktivitas politik masyarakat sehingga polarisasi kian mengerucut. Dampaknya terbentuk gerakan politik aksi #2019GantiPresiden yang dideklarasikan diberbagai kota di Indonesia. Maka di tahun politik mendatang memungkinkan terbentuknya pergerakan massa yang sama. Atau terbentuk gerakan baru lainnya dengan pola inisiasi yang serupa. Terlebih lagi terbentuknya kelompok seperti ini

di masyarakat secara tidak langsung mengkotak-kotakan masyarakat. Dengan demikian potensi konflik di masyarakat lebih mudah tersulutkan. Di sisi lain, peneliti ingin membongkar makna tersembunyi terkait sistem politik yang dianut masyarakat Indonesia.

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan penulis di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini yaitu

1. Bagaimana analisis teks wacana *2019 Ganti Presiden* dibentuk dalam *Harian Kompas*?
2. Bagaimana praktik diskursif tentang *2019 Ganti Presiden* pada *Harian Kompas*?
3. Bagaimana praksis sosio-budaya tentang hadirnya wacana *2019 Ganti Presiden*?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini yaitu

1. Mengetahui dan membongkar teks wacana *2019 Ganti Presiden* pada *Harian Kompas*.
2. Mengungkap praktik diskursif terkait *2019 Ganti Presiden* pada *Harian Kompas*.
3. Mengetahui dan menganalisis praksis sosio-budaya tentang *2019 Ganti Presiden*.

1.4. Manfaat Penelitian

Sejalan dengan tujuan penelitian yang telah dipaparkan penulis, maka manfaat penelitian ini diharapkan dapat:

1. Manfaat Teoretis

- a. Diharapkan mampu memberi kontribusi terhadap paradigma-paradigma kritis yang berhubungan dengan sebuah fenomena sosial.
- b. Diharapkan mampu mengungkap ideologi dibalik tulisan yang diciptakan karena tidak ada bahasa yang netral.

2. Manfaat Praktik

- a. Memberikan pemahaman dan kontribusi kepada masyarakat dalam menerima segala informasi di media.
- b. Masyarakat harus mencermati dengan saksama apa maksud dari sebuah pernyataan terkait isu-isu dan wacana politik yang muncul di tengah masyarakat sehingga menghindari potensi konflik atau perpecahan yang bisa saja terjadi.